

Katalog BPS: 9302004.3512

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN**

KABUPATEN SITUBONDO

2010-2014

<https://situbondolab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SITUBONDO

Katalog BPS: 9302004.3512

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN**

KABUPATEN SITUBONDO

2010-2014



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SITUBONDO

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN SITUBONDO MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2010 – 2014**

Katalog BPS : 9302004.3512

Nomor Publikasi : 35120.1504

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : 68 + viii

Naskah : Seksi Neraca Wilayah Dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh : BPS Kabupaten Situbondo

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Produk domestic Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model –model ekonomi dalam rangka penyusunan formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sector keuangan(*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen , yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya

Situbondo, Desember 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Kabupaten Situbondo,



Harsono, SE

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	2
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	3
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	6
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	9
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	12
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	14
2.5 Perubahan Inventori	19
2.6 Ekspor dan Impor Barang serta Jasa	23
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010-2014	25
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Situbondo Menurut Pengeluaran	26
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	30
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	35
3.4 Konsumsi Akhir Pemerintah	36
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	38

3.6	Perkembangan Perubahan Inventori	40
3.7	Perkembangan Ekspor	41
3.8	Perkembangan Impor	43
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010-2014	45
4.1	PDRB (Nominal)	46
4.2	Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	47
4.3	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	48
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	49
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	50
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	50
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	51
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	52
4.9	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	54
	PENUTUP	56
	LAMPIRAN	59
	DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2014	26
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2014	27
Tabel 3	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2014	28
Tabel 4	Pertumbuhan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2014	29
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Situbondo, Tahun 2010-2014	29
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Situbondo, Tahun 2010-2014	30
Tabel 7	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Situbondo, Tahun 2010-2014	32
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Situbondo, Tahun 2010-2014	33
Tabel 9	Perubahan Indeks Harga Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Situbondo, Tahun 2010-2014	34
Tabel 10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014	35
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014	36
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014	39
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014	41
Tabel 14	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014	41
Tabel 15	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014	43

Tabel 16	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014	46
Tabel 17	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010 – 2014	47
Tabel 18	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2010 – 2014	48
Tabel 19	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014	49
Tabel 20	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010 – 2014	50
Tabel 21	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Situbondo Tahun 2010 – 2014	51
Tabel 22	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014	51
Tabel 23	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kabupaten Situbondo Tahun 2010 – 2014	53
Tabel 24	Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 - 2014	55

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 - 2014	28
----------	--	----

<https://situbondokab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo	60
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo	61
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo	62
Tabel 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo	63
Tabel 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo	64
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo	65

<https://situbondokab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17.

Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

- c. Menurut Pendekatan Pengeluaran,** PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://situbondokab.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Komponen konsumsi rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan

7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan caramendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:

- a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
 3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP;
 4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
 5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
 6. PKRT adh konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Komponen konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai komponen tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Komponen ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang

punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;

- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasartersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
 x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran
 n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
 i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
 j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRTADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya

seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.

2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Komponen konsumsi pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan ;b. PK-Pemerintah Provinsi di wilayah pemerintah Kabupaten ;c.PK-Pemerintah Pusat di wilayah Kabupaten bersangkutan ;d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Kabupaten bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1.Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2.Metode Penghitungan

- a. PK-P Kabupaten adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Kabupaten , PK-P Kabupaten adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan + pengeluaran pemerintah Provinsi yang menjadi bagian dari Kabupaten yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis

barang modal seperti: bangunan dan konstruksilain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;
1. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
1. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overall mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Kabupaten.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga .
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di "*deflate*" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi

jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori

menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;

- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjenk Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas

hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

PendekatanLangsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adhb berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat

diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;

- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 EKSPOR IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan jaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kabupaten di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk kabupaten dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

**TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN
SITUBONDO BERDASARKAN PDRB
PENGELUARAN KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2010 - 2014**

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Situbondo akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 s.d 2014, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Situbondo digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPR, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut

3.1 TINJAUAN AGEGAT PDRB SITUBONDO MENURUT PENGELUARAN

Setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi Indonesia dan dunia sejak tahun 2008, kondisi perekonomian Situbondo menunjukkan tanda pemulihan. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	(Juta Rp)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6.486.253,76	7.127.282,74	7.784.450,34	8.617.029,62	9.373.032,22
2. Konsumsi LNPR	65.174,24	78.512,79	84.976,13	103.082,62	114.376,16
3. Konsumsi Pemerintah	946.446,29	1.132.034,92	1.400.839,86	1.597.570,27	1.673.542,87
4. PMTB	1.957.105,84	2.138.899,15	2.377.436,04	2.567.912,08	2.846.909,82
5. Perubahan Inventori	236.137,07	72.936,83	2.000,01	10.190,68	572.044,38
6. Ekspor Luar Negeri	1.582.714,12	1.666.436,08	1.787.264,84	2.023.176,80	1.705.733,43
7. Impor Luar Negeri	2.802.416,09	2.679.669,78	2.728.725,66	3.010.955,20	2.938.594,48
Total PDRB	8.471.415,24	9.536.432,73	10.708.241,55	11.908.006,88	13.347.044,40

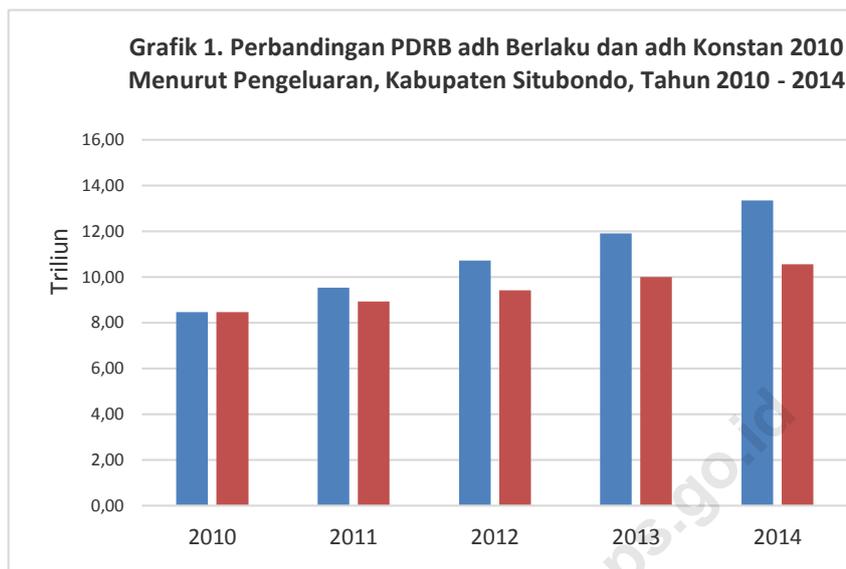
Nilai PDRB Situbondo adh Berlaku selama periode tahun 2010 s.d 2014 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo Tahun 2010-2014

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2104
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6.486.253,76	6.757.493,72	7.073.893,15	7.426.989,55	7.816.552,71
2. Konsumsi LNPR	65.174,24	65.991,06	67.664,14	75.388,54	84.612,31
3. Konsumsi Pemerintah	946.446,29	972.847,83	1.050.585,53	1.139.766,60	1.182.455,39
4. PMTB	1.957.105,84	2.045.657,63	2.205.794,87	2.294.432,51	2.415.548,20
5. Perubahan Inventori	236.137,07	104.114,91	1.075,69	16.801,45	418.926,50
6. Ekspor	1.582.714,12	2.013.671,29	2.355.145,45	2.603.011,44	2.583.667,27
7. Impor	2.802.416,09	3.032.717,00	3.342.556,00	3.551.101,20	3.943.301,00
Total PDRB	8.471.415,24	8.927.059,43	9.411.602,82	10.005.288,88	10.558.461,38

PDRB menurut pengeluaran selain dinilai atas dasar harga Berlaku juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2010-2014, gambaran tentang perkembangan ekonomi Situbondo berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Dari grafik di bawah, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor luar negeri, impor luar negeri dan net ekspor antar daerah atau ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah.

Tabel 3. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Situbondo, 2010 – 2014

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	76,57	74,74	72,70	72,36	70,23
2. Konsumsi LNPRT	0,77	0,82	0,79	0,87	0,86
3. Konsumsi Pemerintah	11,17	11,87	13,08	13,42	12,54
4. PMTB	23,10	22,43	22,20	21,56	21,33
5. Perubahan Inventori	2,79	0,76	0,02	0,09	4,29
6. Ekspor	18,68	17,47	16,69	16,99	12,78
7. Impor	33,08	28,10	25,48	25,29	22,02
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2014**

Komponen Pengeluaran	(Persen)			
	2011	2012	2013	2014
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,18	4,68	4,99	5,25
2. Konsumsi LNPRT	1,25	2,54	11,42	12,23
3. Konsumsi Pemerintah	2,79	7,99	8,49	3,75
4. PMTB	4,52	7,83	4,02	5,28
5. Perubahan Inventori	-55,91	-98,97	1461,93	2393,39
6. Ekspor	27,23	16,96	10,52	-0,74
7. Impor	8,22	10,22	6,24	11,04
Total PDRB	5,38	5,43	6,31	5,53

Pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Situbondo dari tahun 2011 s.d 2014 secara rata-rata mencapai 5,66 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,38 persen (2011); 5,43 persen (2012); 6,31 persen (2013); dan 5,53 persen (2014). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 6,31 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar (5,38 persen).

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Situbondo, Tahun 2010- 2014**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	100,00	105,47	110,04	116,02	119,91
2. Konsumsi LNPRT	100,00	118,97	125,59	136,74	135,18
3. Konsumsi Pemerintah	100,00	116,36	133,34	140,17	141,53
4. PMTB	100,00	104,56	107,78	111,92	117,86

5. Ekspor	100,00	70,05	185,93	60,65	136,55
6. Impor	100,00	82,76	75,89	77,72	66,02
<u>Total PDRB</u>	100,00	88,36	81,64	84,79	74,52

Sementara itu, indeks implisit¹PDRB menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Juta Rp)	6.486.253,76	7.127.282,74	7.784.450,34	8.617.029,62	9.373.032,22
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	6.486.253,76	6.757.493,72	7.073.893,15	7.426.989,55	7.816.552,71
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	76,57	74,74	72,70	72,36	70,23
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	29.846,31	32.630,19	35.935,14	40.517,55	44.877,32
b. ADHK 2010	29.846,31	30.937,22	32.655,02	34.921,94	37.425,02
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	10.015,54	10.943,79	11.900,05	13.042,23	14.073,35
b. ADHK 2010	10.015,54	10.375,98	10.813,82	11.241,06	11.736,34
<u>Pertumbuhan^[1]</u>					
a. Total konsumsi RT	-	4,18	4,68	4,99	5,25

¹ Indeks perkembangan

b. Per-RT	-	3,66	5,55	6,94	7,17
c. Perkapita	-	3,60	4,22	3,95	4,41
Jumlah RT (<i>unit</i>)	217.322	218.426	216.625	212.674	208.859
Jumlah Penduduk	647.619	651.263	654.153	660.702	666.013

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 – 2014 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010 s.d 2014 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu 76,57 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu 70,23 persen.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Pada tahun 2010, secara umum setiap rumah tangga di Situbondo menghabiskan dana sekitar 29.846,31 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 32.630,19 ribu rupiah (2011); 35.935,14 ribu rupiah (2012); 40.517,55 ribu rupiah (2013); dan 44.877,32 ribu rupiah (2014).

Sementara itu, pada perkiraan *adh Konstan* 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 4 sampai 5 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,25 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-

rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Situbondo meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 3,60 s.d 4,41 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh Konstan meningkat dari 4,18 persen ditahun 2011 menjadi sebesar 4,68 persen (2012), pada tahun 2013 meningkatmenjadi 4,99 persen, Sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 5,25 persen. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per-kapita selaras dengan adh Konstan dimana meningkat dari 3,60 persen pada tahun 2011menjadi sebesar 4,22 persen pada tahun 2012.Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen.Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014²

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014
-1	-2	-3	-4	-5	-6
a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	36,05	35,75	35,07	34,70	33,98
b. Minuman Beralkohol dan Rokok	5,29	5,24	5,27	5,04	4,81
c. Pakaian	3,46	3,54	3,60	3,48	3,34
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	8,51	8,41	8,45	8,71	8,70
e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	2,59	2,53	2,56	2,59	2,50
f. Kesehatan	3,19	3,42	3,66	3,65	3,39
g. Transportasi/ Angkutan	14,64	14,38	14,21	14,23	15,05
h. Komunikasi	4,29	4,20	3,98	4,03	4,33
i. Rekreasi dan Budaya	3,37	3,31	3,27	3,29	3,48
j. Pendidikan	1,93	2,11	2,25	2,25	2,23
k. Penginapan dan Hotel	14,80	15,16	15,74	16,14	16,40
l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1,87	1,97	1,93	1,88	1,80

²Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
----------------	--------	--------	--------	--------	--------

Secara rata-rata dari tahun 2010 s.d 2013, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Situbondo, bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 41,34 persen (2010) ; 40,99 persen (2011) ; 40,34 persen (2012) ; 39,74 persen (2013) ; dan 38,79 persen (2014). Sementara proporsi pengeluaran bukan makanan menunjukkan bahwa konsumsi akhir rumah tangga Situbondo yang tertinggi adalah subkomponen penginapan dan hotel yang berada pada kisaran 14,80 sampai 16,40 persen dari total konsumsi akhir rumah tangga.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013	2014
-1	-3	-4	-5	-6
a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	3,36	3,33	2,17	3,47
b. Minuman Beralkohol dan Rokok	1,55	3,30	3,52	3,15
c. Pakaian	8,10	3,30	4,88	4,98
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	5,21	5,16	11,23	4,02
e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	3,06	6,35	7,83	0,49
f. Kesehatan	8,40	8,09	6,56	1,54
g. Transportasi/Angkutan	4,55	5,77	6,97	10,01
h. Komunikasi	2,97	6,27	6,48	9,61

i. Rekreasi dan Budaya	3,20	6,30	5,92	8,80
j. Pendidikan	7,41	7,83	6,73	5,58
k. Penginapan dan Hotel	3,98	4,84	4,89	6,27
l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	9,76	6,78	4,89	0,40
<hr/>				
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,18	4,68	4,99	5,25
<hr/>				

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan menunjukkan fluktuasi, dengan masing-masing sebesar 4,92 persen (2011) ; 5,62 persen (2012) ; 6,79 persen (2013) dan 6,43 persen (2014). Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Perubahan Indeks Harga Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014³

Kelompok Konsumsi	(persen)			
	2011	2012	2013	2014
-1	-3	-4	-5	-6
a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	5,41	3,71	7,18	2,97
b. Minuman Beralkohol dan Rokok	7,29	6,28	2,35	0,61
c. Pakaian	3,94	7,51	2,05	-0,61
d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	3,18	4,46	2,56	4,39
e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	3,90	4,13	3,79	4,55
f. Kesehatan	8,71	8,26	3,48	-0,65
g. Transportasi/ Angkutan	3,20	2,02	3,64	4,60
h. Komunikasi	4,43	-2,56	5,30	6,50
i. Rekreasi dan Budaya	4,56	1,48	5,37	5,73
j. Pendidikan	11,63	7,84	4,06	2,00
k. Penginapan dan Hotel	8,21	8,21	8,23	3,94

³Tingkat perubahan harga produk konsumsi

I. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	5,29	0,58	2,35	3,67
Konsumsi Rumah Tangga	5,47	4,34	5,43	3,35

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk setiap kelompok konsumsi. Selama periode 2011 - 2014 peningkatan harga (inflasi) fluktuatif. Rincian peningkatan harga pada konsumsi rumah tangga sebesar 5,47persen (2011) ; 4,34 persen (2012) ; 5,43 persen (2013) dan 3,35 persen (2014).

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB.

Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Juta Rp)	65.174,24	78.512,79	84.976,13	103.082,62	114.376,16
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	65.174,24	65.991,06	67.664,14	75.388,54	84.612,31
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,77	0,82	0,79	0,87	0,86

Selama periode tahun 2010 - 2014 konsumsi LNPRT baik secara adh Berlaku maupun adh Konstan 2010 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 konsumsi LNPRT adh Berlaku sebesar 65.174,24 juta rupiah kemudian meningkat menjadi 78.512,79 juta rupiah (2011), 84.976,13 juta rupiah (2012), 103.082,62 juta rupiah (2013) dan 114.376,16 juta

rupiah(2014). Demikian juga dengan konsumsi LNPRT secara adh Konstan yaitu sebesar 65.174,24 juta rupiah pada tahun 2010 dan selanjutnya meningkat hingga sebesar 84.612,31 juta rupiah pada tahun 2014. Jika dilihat lebih lanjut proporsi konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) walaupun mengalami peningkatan selama periode 2010 - 2014, namun merupakan komponen yang paling kecil kontribusinya dalam penggunaan produk domestik regional bruto yaitu pada kisaran 1 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah ditambah pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Situbondo serta bagaimana perkembangannya dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 - 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	946.446,29	1.132.034,92	1.400.839,86	1.597.570,27	1.673.542,87
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	946.446,29	972.847,83	1.050.585,53	1.139.766,60	1.182.455,39
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	11,17	11,87	13,08	13,42	12,54
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	1.461,42	1.738,21	2.141,46	2.417,99	2.512,78
b. ADHK 2010	1.461,42	1.493,79	1.606,02	1.725,08	1.775,42
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	101.517,35	123.949,95	159.258,74	187.883,13	205.898,48
b. ADHK 2010	101.517,35	106.520,07	119.439,01	134.042,88	145.479,26
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi pemerintah	-	2,79	7,99	8,49	3,75
b. Konsumsi perkapita	-	2,21	7,51	7,41	2,92

c. Konsumsi per-pegawai	-	4,93	12,13	12,23	8,53
Jumlah Pegawai Pemerintah	9.323	9.133	8.796	8.503	8.128
Jumlah penduduk (<i>org</i>)	647.619	651.263	654.153	660.702	666.013

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah secara total menunjukkan peningkatan baik untuk *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah *adh Berlaku* sebesar 946.446,29juta rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2014 nilainya mencapai 1.673.542,87 juta rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah *adh Konstan* 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, dari hanya 11,17 persen ditahun 2010 hingga mencapai 12,54 persen pada tahun 2014. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2010; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2013 yang mencapai 13,42 persen. Peningkatan tersebut cenderung didominasi oleh pengeluaran pemerintah untuk konsumsi kolektif.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (*publik*). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-kapita *adh Berlaku* sebesar 1.461,42 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 9).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita *adh Konstan* (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 9). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 2,21 persen pada tahun 2011

meningkat menjadi 7,51 (2012) dan 7,41 (2013). Namun pada tahun 2014 turun menjadi sebesar 2,92 persen.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per-pegawai pemerintah sebesar 101.517,35 ribu rupiah, kemudian meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 9). Pada tingkat harga konstan 2010 indikator pemerataan menurut pegawai ini juga menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 12,23 persen.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukkan peningkatan (baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*). Hal tersebut diikuti pula dengan jumlah pegawai pemerintah yang juga terus mengalami peningkatan. Selama periode tahun 2010 s.d 2014 jumlah pegawai pemerintah mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Pada tahun 2010 jumlah pegawai pemerintah berjumlah 9323 orang dan terus menurun hingga tahun 2014..

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dan 2013, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 7,99 persen dan 8,49 persen; untuk konsumsi per-kapita 7,51 persen dan 7,41 persen; sedangkan untuk konsumsi per-pegawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2014 yaitu 12,13 persen dan 12,23 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan

sebagai investasi fisik (kapital)⁴. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2010 - 2014 (tabel 11). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Proporsi sub komponen bangunan terhadap total PMTB relatif stabil sekitar 76 persen selama periode tahun 2010 - 2014.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
Total PMTB					
a. ADHB (Juta Rp)	1.957.105,84	2.138.899,15	2.377.436,04	2.567.912,08	2.846.909,82
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	1.957.105,84	2.045.657,63	2.205.794,87	2.294.432,51	2.415.548,20
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	23,10	22,43	22,20	21,56	21,33
Struktur PMTB [1]					
a. Bangunan (Juta Rp)	1.491.129,13	1.631.723,13	1.813.345,63	1.957.555,02	2.180.450,74
(%)	76,19	76,29	76,27	76,23	76,59
b. Non Bangunan (Juta Rp)	465.976,71	507.176,02	564.090,41	610.357,06	666.459,08
(%)	23,81	23,71	23,73	23,77	23,41
Total PMTB (Juta Rp)	1.957.105,84	2.138.899,15	2.377.436,04	2.567.912,08	2.846.909,82
(%)	100	100	100	100	100
Pertumbuhan[2] (%)					
a. Bangunan	-	1,02	7,26	5,77	5,36
b. Non Bangunan	-	15,72	9,41	-0,78	5,03
Total PMTB	-	4,52	7,83	4,02	5,28

⁴ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

Sementara jika dilihat pertumbuhannya, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2010 - 2014 meningkat dari 4,52 persen (2011) menjadi 5,28 persen (2014). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Pertumbuhan sub komponen bangunan menunjukkan pola yang variatif antar tahunnya. Pada tahun 2011 pertumbuhan komponen bangunan sebesar 1,02 persen kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 7,26 persen. Namun pada tahun 2013 dan 2014 menurun hingga pertumbuhannya hanya mencapai 5,77 persen dan 5,36 persen. Sedangkan Non Bangunan mengalami fluktuasi pertumbuhan dari 15,72 persen tahun 2011 menurun menjadi 9,41 persen (2012) dan -0,78persen (2013). Kemudian meningkat kembali menjadi 5,03persen (2014).

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2010-2014 pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi di mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai besaran angka 7,83 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu hanya sebesar 4,02 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Juta Rp)	236.137,07	72.936,83	2.000,01	10.190,68	572.044,38
b. ADHK 2010 (Juta Rp)	236.137,07	104.114,91	1.075,69	16.801,45	418.926,50
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	2,79	0,76	0,02	0,09	4,29

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2010 perubahan inventori sebesar 236.137,07 juta rupiah, kemudian tahun 2011 perubahan inventori nilainya sebesar 72.936,83 juta rupiah. Perubahan inventori pada tahun 2012 sebesar 2.000,01 juta rupiah dan pada tahun berikutnya meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 10.190,68 juta rupiah (2013) dan 572.044,38 juta rupiah (2014).

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung.

**Tabel 14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Total Nilai Ekspor					

a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	1.582.714,12	1.666.436,08	1.787.264,84	2.023.176,80	1.705.733,43
b. ADHK 2000 (<i>Juta Rp</i>)	1.582.714,12	2.013.671,29	2.355.145,45	2.603.011,44	2.583.667,27
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	18,68	17,47	16,69	16,99	12,78
Pertumbuhan					
Total ekspor	-	27,23	16,96	10,52	-0,74

Secara total, nilai ekspor tahun 2014 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 nilai ekspor sebesar 1.582.714,12 juta rupiah dan tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup tajam menjadi sebesar 1.666.436,08 juta rupiah. Tahun 2012 ekspor meningkat menjadi sebesar 1.787.264,84 juta rupiah. Pada tahun berikutnya, nilai ekspor meningkat lagi sehingga menjadi sebesar 2.023.176,80 juta rupiah (2013), dan 1.705.733,43 juta rupiah pada tahun 2014. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 1.582.714,12 juta rupiah (2010); 2.013.671,29 juta rupiah (2011); 2.355.145,45 juta rupiah (2012); 2.603.011,44 juta rupiah (2013); dan menurun menjadi sebesar 2.583.667,27 juta rupiah (2014). Hal ini juga sejalan dengan proporsinya dalam PDRB selama kurun waktu 2010 – 2014 yaitu dari 18,68 persen pada tahun 2010 menjadi 17,47 persen di tahun 2011. Pada tahun 2012 proporsinya menjadi 16,69 persen dan meningkat menjadi 16,99 persen pada tahun 2013 dan turun menjadi 12,78 persen pada tahun 2014.

Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor Situbondo berupa barang (rata-rata diatas 90 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Sedangkan pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang sangat tinggi, khususnya pada tahun 2011 yang mencapai 27,23 persen. Pertumbuhan tersebut lebih disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 ekspor tumbuh sebesar 16,96 persen dan 10,52 persen. Sementara itu pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2014 (minus 0,74 persen) dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 10,52 persen.

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Situbondo. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungannya yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rinciannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Situbondo terhadap ekonomi atau produk negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Situbondo di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 - 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	2.802.416,09	2.679.669,78	2.728.725,66	3.010.955,20	2.938.594,48
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	2.802.416,09	3.032.717,00	3.342.556,00	3.551.101,20	3.943.301,00
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	33,08	28,10	25,48	25,29	22,02
Pertumbuhan impor	-	8,22	10,22	6,24	11,04

Tabel 15 di atas menunjukkan pola perkembangan impor Situbondo pada periode tahun 2010 s.d 2014 yang cenderung meningkat (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Pada tahun 2011 nilai impor mengalami peningkatan dimana nilainya mencapai 2.679.669,78 juta rupiah dibanding tahun 2010 yang hanya sebesar 2.802.416,09 juta

rupiah. Pada tahun-tahun berikutnya nilai impor terus mengalami peningkatan hingga mencapai 2.938.594,48 juta rupiah pada tahun 2014.

Proporsi impor LN selama periode 2010 – 2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 proporsi impor LN terhadap PDRB sebesar 33,08 persen dan terus menurun menjadi sebesar 22,02 persen pada tahun 2014.

Di sisi lain, secara riil nilai impor mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada tahun 2011 sebesar 8,22 persen. Pada tahun 2012 pertumbuhan impor cenderung meningkat mencapai 10,22 persen. Namun tahun 2013 terjadi perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 6,24 persen. Pada tahun 2014 pertumbuhan impor LN menggeliat lagi hingga menjadi 11,04 persen.

<https://situbondokab.bps.go.id>

BAB IV

**PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN 2010 - 2014**

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

**Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Nilai PDRB (<i>Juta Rp</i>)					
- ADHB	8.471.415,24	9.536.432,73	10.708.241,55	11.908.006,88	13.347.044,40
- ADHK 2010	8.471.415,24	8.927.059,43	9.411.602,82	10.005.288,88	10.558.461,38
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	13.080,86	14.642,98	16.369,63	18.023,26	20.040,22
- ADHK 2010	13.080,86	13.707,30	14.387,46	15.143,42	15.853,24
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	-	4,79	4,96	5,25	4,69
Jumlah penduduk (<i>org</i>)	647.619	651.263	654.153	660.702	666.013
Pertumbuhan		0,73	0,70	0,67	0,64

Tabel 16 menunjukkan peningkatan PDRB per-kapita Kabupaten Situbondodari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Indonesia rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4-5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 0,2 - 0,3 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi RT di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Situbondo (sekitar 60 persen), yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Situbondo sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 17. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	6.486.253,76	7.127.282,74	7.784.450,34	8.617.029,62	9.373.032,22
Total Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	1.582.714,12	1.666.436,08	1.787.264,84	2.023.176,80	1.705.733,43
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	4,10	4,28	4,36	4,26	5,50

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebanyak 4,10 kali dari yang diekspor. Ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Selama periode 2010 – 2014, rasio perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor menunjukkan kecenderungan meningkat. Secara implisit data tersebut menjelaskan, walaupun nilai konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor semakin meningkat namun peningkatan nilai konsumsi akhir rumah tangga jauh lebih cepat. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Selain itu, peningkatan rasio tersebut juga disebabkan oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Indonesia digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi RT (ADHB) (Juta Rp)	6.486.253,76	7.127.282,74	7.784.450,34	8.617.029,62	9.373.032,22
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	1.957.105,84	2.138.899,15	2.377.436,04	2.567.912,08	2.846.909,82
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	3,31	3,33	3,27	3,36	3,29

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung menurun, dari sebesar 3,31 pada tahun 2010 menjadi 3,33 pada tahun 2011. Pada tahun-tahun berikutnya rasionya menjadi 3,27 (2012), 3,36 (2013), dan 3,29 (2014). Hal ini terjadi karena nilai investasi cenderung melambat, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 19. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)					
a. Rumah tangga	6.486.253,76	7.127.282,74	7.784.450,34	8.617.029,62	9.373.032,22
b. LNPRT	65.174,24	78.512,79	84.976,13	103.082,62	114.376,16
c. Pemerintah	946.446,29	1.132.034,92	1.400.839,86	1.597.570,27	1.673.542,87
Jumlah	7.497.874,30	8.337.830,45	9.270.266,32	10.317.682,52	11.160.951,25
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	8.471.415,24	9.536.432,73	10.708.241,55	11.908.006,88	13.347.044,40
Proporsi	88,51	87,43	86,57	86,64	83,62

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 83 persen). Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB justru

semakin mengalami penurunan. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

Tabel 20. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2010 – 2014

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB)					
(Juta Rp)	1.582.714,12	1.666.436,08	1.787.264,84	2.023.176,80	1.705.733,43
Total PMTB (ADHB)					
(Juta Rp)	1.957.105,84	2.138.899,15	2.377.436,04	2.567.912,08	2.846.909,82
Rasio Ekspor terhadap PMTB	0,81	0,78	0,75	0,79	0,60

Selama tahun 2010-2014, ekspor mempunyai nilai yang lebih rendah dari PMTB dan rasio ekspor terhadap PMTB juga mempunyai kecenderungan menurun dari tahun ke tahun (tabel 20). Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Penurunan rasio tersebut di antaranya disebabkan oleh kenaikan PMTB yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan ekspor.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap

produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

**Tabel 21. Rasio PDRB terhadap Impor
Kabupaten Situbondo Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	8.471.415,24	9.536.432,73	10.708.241,55	11.908.006,88	13.347.044,40
Total Impor (ADHB) (Juta Rp)	2.802.416,09	2.679.669,78	2.728.725,66	3.010.955,20	2.938.594,48
Rasio PDRB terhadap Impor	3,02	3,56	3,92	3,95	4,54

Tabel 21 menunjukkan rasio PDRB terhadap impor selama tahun 2010 - 2014 cenderung meningkat dari sebesar 3,02 pada tahun 2010 menjadi 3,56 pada tahun 2011. Pada tahun berikutnya rasionya terus mengalami penurunan menjadi 3,92(2012), 3,95(2013), dan 4,54(2014). Peningkatan rasio menunjukkan ketergantungan PDRB terhadap produk impor yang semakin menurun.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

**Tabel 22. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Kabupaten Situbondo, Tahun 2010 – 2014**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Total Penyediaan</u>					
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	8.471.415,24	9.536.432,73	10.708.241,55	11.908.006,88	13.347.044,40
%	75,14	78,06	79,69	79,82	81,96

Total nilai Impor ADHB					
(Juta Rp)	2.802.416,09	2.679.669,78	2.728.725,66	3.010.955,20	2.938.594,48
%	24,86	21,94	20,31	20,18	18,04
<u>Total Permintaan Akhir(Juta Rp)</u>	11.273.831,33	12.216.102,51	13.436.967,21	14.918.962,08	16.285.638,88
%	100	100	100	100	100

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik, sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar daerah, dengan rentang 18 s.d 25 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 75 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 11.273.831,33 juta (2010) menjadi sebesar 16.285.638,88 juta rupiah (2014).

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 8.471.415,24 juta rupiah (2010); 9.536.432,73 juta rupiah (2011); 10.708.241,55 juta rupiah (2012); 11.908.006,88 juta rupiah (2013); dan 13.347.044,40 juta rupiah (2014). Karena produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa diimpor, dengan nilai masing-masing tahun sebesar 2.802.416,09 juta rupiah (2010); 2.679.669,78 juta rupiah (2011); 2.728.725,66 juta rupiah (2012); 3.010.955,20 juta rupiah (2013); dan 2.938.594,48 juta rupiah (2014).

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau

posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu negara sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 23. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa,
Kabupaten Situbondo Tahun 2010 – 2014**

U r a i a n	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	1.582.714,12	1.666.436,08	1.787.264,84	2.023.176,80	1.705.733,43
Nilai Impor (ADHB)(Juta Rp)	2.802.416,09	2.679.669,78	2.728.725,66	3.010.955,20	2.938.594,48
Net ekspor (X - M) (Juta Rp)	-1.219.701,97	-1.013.233,70	-941.460,82	-987.778,40	-1.232.861,05
Rasio ekspor thdp Impor	0,56	0,62	0,65	0,67	0,58

Selama periode 2011 - 2014, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Situbondodengan luar negeri dan antar provinsi, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Situbondo cenderung dalam posisi minus. Nilai impor yang lebih besar dari ekspor menyebabkan adanya aliran devisa keluar. Pada tahun 2010 posisi perdagangan barang dan jasa mengalami defisit dimana nilai impor lebih besar daripada ekspor yaitu minus 1.219.701,97 juta rupiah. Posisi minus perdagangan Kabupaten Situbondo juga terjadi antara tahun 2011 sampai dengan 2014 tercatat masing-masing sebesar 1.013.233,70 juta rupiah (2011),

941.460,82 juta rupiah (2012), 987.778,40 juta rupiah (2013) dan 1.232.861,05 juta rupiah (2014).

Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung meningkat dari tahun 2010-2014. Pada tahun 2010 rasionya sebesar 0,56 meningkat menjadi 0,62 pada tahun 2011, kemudian 0,65 pada tahun 2012, meningkat lagi menjadi 0,67 pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 sebesar 0,58.

4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 24. Incremental Capital Output Ratio,
Kabupaten Situbondo, Tahun 2011 - 2014**

Uraian	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDRB (ADHK 2010)				
(Juta rupiah)	8.927.059,43	9.411.602,82	10.005.288,88	10.558.461,38
Perubahan				
(Juta rupiah)	455.644,20	484.543,39	593.686,06	553.172,49
PMTB (ADHK 2010) (Juta Rp)	2.045.657,63	2.205.794,87	2.294.432,51	2.415.548,20
ICOR	4,49	4,55	3,86	4,37

Data di atas menunjukkan besaran ICOR fluktuatif dari sebesar 4,49 (2011) meningkat menjadi 4,55 (2012) dan menurun 3,86 (2013). Pada tahun 2014 ICOR meningkat menjadi 4,37.

<https://situbondokab.bps.go.id>

BAB V

PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2010 s.d 2014 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Situbondopada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaranakan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2010 s.d 2014, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara

agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Situbondo terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<https://situbondokab.bps.go.id>

<https://situbondokab.bps.go.id>

LAMPIRAN

TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU						
MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN SITUBONDO (JUTA RUPIAH)						
Komponen Pengeluaran		2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.)	6.486.253,8	7.127.282,7	7.784.450,3	8.617.029,6	9.373.032,2
	a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	2.338.391,9	2.547.731,5	2.730.302,0	2.989.812,4	3.185.289,0
	b. Minuman Beralkohol dan Rokok	342.952,9	373.658,0	410.219,7	434.626,8	451.026,6
	c. Pakaian	224.496,2	252.242,7	280.141,7	299.842,3	312.881,7
	d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	551.899,6	599.095,5	658.117,5	750.755,6	815.179,7
	e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Furnitur	168.077,4	179.974,0	199.302,3	223.042,5	234.329,3
	f. Kesehatan	206.891,0	243.810,1	285.297,9	314.583,3	317.348,7
	g. Transportasi/Angkutan	949.882,9	1.024.868,8	1.105.902,8	1.226.081,4	1.410.795,2
	h. Komunikasi	278.201,9	299.154,9	309.784,6	347.330,5	405.474,8
	i. Rekreasi dan Budaya	218.473,5	235.749,8	254.316,0	283.840,0	326.513,1
	j. Pendidikan	125.427,9	150.387,7	174.873,5	194.221,3	209.161,1
	k. Penginapan dan Hotel	960.196,1	1.080.362,0	1.225.576,3	1.391.199,8	1.536.750,1
	l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	121.362,5	140.247,7	150.616,2	161.693,6	168.283,0
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	65.174,2	78.512,8	84.976,1	103.082,6	114.376,2
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	946.446,29	1.132.034,92	1.400.839,86	1.597.570,27	1.673.542,87
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.957.105,8	2.138.899,2	2.377.436,0	2.567.912,1	2.846.909,8
	a. Bangunan	1.491.129,1	1.631.723,1	1.813.345,6	1.957.555,0	2.180.450,7
	b. Non-Bangunan	465.976,7	507.176,0	564.090,4	610.357,1	666.459,1
5	Perubahan Inventori	236.137,1	72.936,8	2.000,0	10.190,7	572.044,4
6	Ekspor	1.582.714,1	1.666.436,1	1.787.264,8	2.023.176,8	1.705.733,4
7	Impor	2.802.416,1	2.679.669,8	2.728.725,7	3.010.955,2	2.938.594,5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		8.471.415,2	9.536.432,7	10.708.241,6	11.908.006,9	13.347.044,4

TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010						
MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN SITUBONDO (JUTA RUPIAH)						
Komponen Pengeluaran	2010*	2011*	2012*	2013*	2014**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.	6.486.253,8	6.757.493,7	7.073.893,1	7.426.989,6	7.816.552,7
	a. Makanan dan Minuman Non Beralko	2.338.391,9	2.417.033,0	2.497.500,4	2.551.753,4	2.640.206,6
	b. Minuman Beralkohol dan Rokok	342.952,9	348.276,5	359.769,6	372.426,7	384.143,8
	c. Pakaian	224.496,2	242.680,4	250.700,4	262.931,2	276.037,6
	d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bah	551.899,6	580.653,5	610.615,3	679.201,3	706.499,4
	e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan	168.077,4	173.226,0	184.222,9	198.646,3	199.612,1
	f. Kesehatan	206.891,0	224.269,8	242.406,5	258.298,8	262.265,0
	g. Transportasi/Angkutan	949.882,9	993.102,6	1.050.404,6	1.123.669,9	1.236.131,7
	h. Komunikasi	278.201,9	286.475,1	304.443,2	324.174,5	355.335,8
	i. Rekreasi dan Budaya	218.473,5	225.457,7	239.663,5	253.843,6	276.186,1
	j. Pendidikan	125.427,9	134.716,4	145.263,6	155.042,7	163.699,6
	k. Penginapan dan Hotel	960.196,1	998.400,5	1.046.674,2	1.097.818,8	1.166.662,3
	l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	121.362,5	133.202,2	142.228,9	149.182,4	149.772,6
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	65.174,2	65.991,1	67.664,1	75.388,5	84.612,3
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	946.446,29	972.847,83	1.050.585,53	1.139.766,60	1.182.455,39
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.957.105,8	2.045.657,6	2.205.794,9	2.294.432,5	2.415.548,2
	a. Bangunan	1.491.129,1	1.506.406,5	1.615.800,2	1.709.013,0	1.800.657,0
	b. Non-Bangunan	465.976,7	539.251,1	589.994,7	585.419,5	614.891,2
5	Perubahan Inventori	236.137,1	104.114,9	1.075,7	16.801,5	418.926,5
6	Ekspor	1.582.714,1	2.013.671,3	2.355.145,4	2.603.011,4	2.583.667,3
7	Impor	2.802.416,1	3.032.717,0	3.342.556,0	3.551.101,2	3.943.301,0
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8.471.415,2	8.927.059,4	9.411.602,8	10.005.288,9	10.558.461,4

TABEL 3. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU						
MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN SITUBONDO (%)						
Komponen Pengeluaran		2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.	76,57	74,74	72,70	72,36	70,23
	a. Makanan dan Minuman Non Beralko	27,6	26,7	25,5	25,1	23,9
	b. Minuman Beralkohol dan Rokok	4,0	3,9	3,8	3,6	3,4
	c. Pakaian	2,7	2,6	2,6	2,5	2,3
	d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Baha	6,5	6,3	6,1	6,3	6,1
	e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8
	f. Kesehatan	2,4	2,6	2,7	2,6	2,4
	g. Transportasi/Angkutan	11,2	10,7	10,3	10,3	10,6
	h. Komunikasi	3,3	3,1	2,9	2,9	3,0
	i. Rekreasi dan Budaya	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4
	j. Pendidikan	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
	k. Penginapan dan Hotel	11,3	11,3	11,4	11,7	11,5
	l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1,4	1,5	1,4	1,4	1,3
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,2	11,9	13,1	13,4	12,5
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	23,1	22,4	22,2	21,6	21,3
	a. Bangunan	17,6	17,1	16,9	16,4	16,3
	b. Non-Bangunan	5,5	5,3	5,3	5,1	5,0
5	Perubahan Inventori	2,8	0,8	0,0	0,1	4,3
6	Ekspor	18,7	17,5	16,7	17,0	12,8
7	Impor	33,1	28,1	25,5	25,3	22,0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

TABEL 4. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU					
MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN SITUBONDO (%)					
Komponen Pengeluaran		2011*	2012*	2013*	2014**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.)	4,18	4,68	4,99	5,25
	a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	3,4	3,3	2,2	3,5
	b. Minuman Beralkohol dan Rokok	1,6	3,3	3,5	3,1
	c. Pakaian	8,1	3,3	4,9	5,0
	d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	5,2	5,2	11,2	4,0
	e. Perabot, Peralatan rumah tangga dan Furnitur	3,1	6,3	7,8	0,5
	f. Kesehatan	8,4	8,1	6,6	1,5
	g. Transportasi/Angkutan	4,5	5,8	7,0	10,0
	h. Komunikasi	3,0	6,3	6,5	9,6
	i. Rekreasi dan Budaya	3,2	6,3	5,9	8,8
	j. Pendidikan	7,4	7,8	6,7	5,6
	k. Penginapan dan Hotel	4,0	4,8	4,9	6,3
	l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	9,8	6,8	4,9	0,4
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,3	2,5	11,4	12,2
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,8	8,0	8,5	3,7
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,5	7,8	4,0	5,3
	a. Bangunan	1,0	7,3	5,8	5,4
	b. Non-Bangunan	15,7	9,4	(0,8)	5,0
5	Perubahan Inventori	(55,9)	(99,0)	1.461,9	2.393,4
6	Ekspor	27,2	17,0	10,5	(0,7)
7	Impor	8,2	10,2	6,2	11,0
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,4	5,4	6,3	5,5

TABEL 5. INDEKS HARGA IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010						
MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN SITUBONDO						
Komponen Pengeluaran		2010*	2011*	2012*	2013*	2014**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.	100,00	105,47	110,04	116,02	119,91
	a. Makanan dan Minuman Non Beralko	100,0	105,4	109,3	117,2	120,6
	b. Minuman Beralkohol dan Rokok	100,0	107,3	114,0	116,7	117,4
	c. Pakaian	100,0	103,9	111,7	114,0	113,3
	d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bah	100,0	103,2	107,8	110,5	115,4
	e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan	100,0	103,9	108,2	112,3	117,4
	f. Kesehatan	100,0	108,7	117,7	121,8	121,0
	g. Transportasi/Angkutan	100,0	103,2	105,3	109,1	114,1
	h. Komunikasi	100,0	104,4	101,8	107,1	114,1
	i. Rekreasi dan Budaya	100,0	104,6	106,1	111,8	118,2
	j. Pendidikan	100,0	111,6	120,4	125,3	127,8
	k. Penginapan dan Hotel	100,0	108,2	117,1	126,7	131,7
	l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	100,0	105,3	105,9	108,4	112,4
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	100,0	119,0	125,6	136,7	135,2
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,0	116,4	133,3	140,2	141,5
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,0	104,6	107,8	111,9	117,9
	a. Bangunan	100,0	108,3	112,2	114,5	121,1
	b. Non-Bangunan	100,0	94,1	95,6	104,3	108,4
5	Perubahan Inventori	100,0	70,1	185,9	60,7	136,6
6	Ekspor	100,0	82,8	75,9	77,7	66,0
7	Impor	100,0	88,4	81,6	84,8	74,5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,0	106,8	113,8	119,0	126,4

TABEL 6. LAJU INDEKS HARGA IMPLISIT PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010					
MENURUT PENGELUARAN, KABUPATEN SITUBONDO (%)					
Komponen Pengeluaran		2011*	2012*	2013*	2014**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.)	5,47	4,34	5,43	3,35
	a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	5,4	3,7	7,2	3,0
	b. Minuman Beralkohol dan Rokok	7,3	6,3	2,3	0,6
	c. Pakaian	3,9	7,5	2,1	(0,6)
	d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	3,2	4,5	2,6	4,4
	e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Furnitur	3,9	4,1	3,8	4,6
	f. Kesehatan	8,7	8,3	3,5	(0,6)
	g. Transportasi/Angkutan	3,2	2,0	3,6	4,6
	h. Komunikasi	4,4	(2,6)	5,3	6,5
	i. Rekreasi dan Budaya	4,6	1,5	5,4	5,7
	j. Pendidikan	11,6	7,8	4,1	2,0
	k. Penginapan dan Hotel	8,2	8,2	8,2	3,9
	l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	5,3	0,6	2,4	3,7
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	19,0	5,6	8,9	(1,1)
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,4	14,6	5,1	1,0
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,6	3,1	3,8	5,3
	a. Bangunan	8,3	3,6	2,1	5,7
	b. Non-Bangunan	(5,9)	1,7	9,0	4,0
5	Perubahan Inventori	(29,9)	165,4	(67,4)	125,1
6	Ekspor	(17,2)	(8,3)	2,4	(15,1)
7	Impor	(11,6)	(7,6)	3,9	(12,1)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		6,8	6,5	4,6	6,2

<https://situbondokab.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. , *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Situbondo Dalam Angka*, berbagai seri, Situbondo.
4. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Proyeksi Penduduk 2010-2035*, berbagai seri, Jakarta
6. , *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
11. *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
12. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
13. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
14. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
15. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, WashingtonDC, 1979.

16. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
17. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York, 1968.
18. , *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
19. , *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
20. , *Handbook of National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.
21. , *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No.76, New York, 2000.
22. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
23. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SITUBONDO
Jl. Wringin Anom Situbondo